

Evaluasi Pembinaan Program Anak Penyandang Kesejahteraan Sosial di Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya

Talitha Zitha Vasthi

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Bambang Kusbandrijo

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Supri Hartono

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No. 45, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur

***Abstract.** Policy program evaluation is a systematic process for evaluating the effectiveness, efficiency, relevance and impact of a government policy or program. The main objective is to understand the extent to which the program or policy has succeeded in achieving its objectives, as well as to identify areas of improvement or adjustments needed. Policy evaluation is a step important in a sustainable public policy cycle, helping to ensure that policies can provide maximum benefits for the community. The State Children's Village is a program designed by the Surabaya City Social Service to provide services and protection to children who are in need and have social problems in their area. Evaluation of the development program for children with social welfare in the Surabaya City Social Service's State Children's Village was carried out comprehensively to ensure the effectiveness and positive impact of the program. The State Children's Village Program is an initiative of the Surabaya City Social Service which aims to provide guidance and assistance to children who suffer from social welfare. need, especially those who are considered recipients of social welfare or have social problems. This program focuses on developing children through training, coaching and mentoring so that they can live better, more humanely, and learn to behave normally. Through a comprehensive evaluation, the coaching program Kampung Anak Negeri can ensure that efforts to develop children in the city of Surabaya really have a significant impact in improving their welfare and creating better conditions for future generations.*

Keywords: Evaluation, Mentoring, PMKS

Abstrak. Evaluasi program kebijakan adalah proses sistematis untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak suatu kebijakan atau program pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk memahami sejauh mana program atau kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya, serta untuk mengidentifikasi area perbaikan atau penyesuaian diperlukan. Evaluasi kebijakan merupakan langkah penting dalam siklus kebijakan publik yang berkelanjutan, membantu memastikan bahwa kebijakan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Kampung Anak Negeri merupakan program yang dirancang oleh Dinas Sosial Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada anak-anak yang membutuhkan dan memiliki permasalahan sosial di wilayahnya. Evaluasi program pembinaan anak penyandang kesejahteraan sosial di Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya dilakukan secara komprehensif untuk memastikan efektivitas dan dampak positif program tersebut. Program Kampung Anak Negeri merupakan inisiatif dari Dinas Sosial Kota Surabaya yang bertujuan untuk memberikan pembinaan dan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan, terutama mereka yang dianggap sebagai penerima kesejahteraan sosial atau memiliki masalah sosial. Program ini berfokus pada pengembangan anak melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan agar mereka dapat hidup lebih baik, lebih manusiawi, dan belajar berperilaku normal. Melalui evaluasi yang komprehensif, program pembinaan Kampung Anak Negeri dapat memastikan bahwa upaya pembinaan anak-anak di Kota Surabaya benar-benar memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Kata kunci: Evaluasi, Pembinaan, PMKS

LATAR BELAKANG

Kebijakan pemerintah mengenai program masyarakat menjadi penentu kesuksesan suatu daerah. Perbedaan dalam pembangunan di suatu daerah dapat berdampak pada daerah lainnya. Urbanisasi yang berlebihan dapat meningkatkan jumlah penduduk dan mengganggu hubungan antarmanusia yang harmonis. Lingkungan yang tidak mendukung kesehatan fisik, mental, spiritual, atau sosial secara normal dapat dianggap sebagai hambatan. Hambatan dan kesulitan tersebut meliputi kemiskinan, penelantaran, kecacatan, dan masalah sosial atau lingkungan. Perubahan mendadak tidak selalu efektif atau bermanfaat bagi individu dalam kondisi ini. Surabaya, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur, juga menghadapi dinamika ini.

Meskipun terdapat kemajuan pembangunan dan berbagai penghargaan, masalah anak jalanan di Surabaya tampaknya masih sulit diatasi. Anak jalanan di kota ini masih cukup banyak dan mudah dikenali. Jumlah mereka cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dari tahun 2009 hingga 2013, jumlah anak jalanan mengalami variasi yang signifikan. Pada tahun 2009, tercatat ada 285 anak jalanan, kemudian menurun drastis menjadi 80 anak pada tahun 2010, 45 anak pada tahun 2011, dan kembali meningkat menjadi 114 anak pada tahun 2012 dan 2013. Meskipun begitu, data ini hanya mencatat sebagian kecil dari jumlah sebenarnya, mengingat bahwa Surabaya belum memiliki data yang lengkap untuk menjangkau seluruh anak jalanan di kota tersebut.

Permasalahan sosial yang tampak dan tercatat adalah hanya sebagian kecil dari permasalahan yang sebenarnya. Kesenjangan demografi yang semakin membesar dan keterbatasan lapangan kerja mendorong sebagian dari mereka yang membutuhkan bantuan sosial untuk memilih jalan mengemis atau hidup tanpa tempat tinggal tetap. Anak-anak di bawah umur juga semakin banyak yang terdampar menjadi anak jalanan, pengamen, atau pengemis. Beberapa di antara mereka bahkan terlibat dalam tindak kriminal seperti pencurian, sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masyarakat yang menghadapi masalah sosial, baik itu masalah ekonomi, sosial, maupun agama.

Unit Pelayanan Terpadu Dinas Sosial Kota Surabaya bertujuan untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab melalui strategi pembinaan dan pendampingan. Penelitian ini ditujukan untuk memahami strategi yang digunakan oleh Unit Pelayanan Terpadu Kampung Anak Negeri dalam menghadapi masalah anak jalanan di daerah Wonorejo Surabaya. Berdasarkan data yang terdapat dalam Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial

Kota Surabaya Nomor 199 Tahun 2021, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Surabaya selama lima tahun terakhir telah dicatat oleh kelurahan dan kecamatan.

Ada 26 kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didefinisikan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial berdasarkan penyebab atau bentuk disfungsi sosialnya. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Surabaya selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut menurut data yang dikumpulkan oleh kelurahan dan kecamatan, tertulis pada Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor 199 Tahun 2021.

Kemiskinan di Indonesia saat ini memiliki dampak yang signifikan terhadap masalah sosial. Faktor ekonomi yang menurun dan kurangnya kesempatan kerja menjadi faktor penentu bagi banyak individu dalam mencari mata pencaharian. Banyak dari mereka yang memilih untuk mencari peluang kerja di jalanan, seperti mengemis atau menjadi buruh jalanan, serta menjadi musisi jalanan atau penjual koran. Anak jalanan, yang sebagian besar menghabiskan waktu di jalanan, menjadi salah satu akibat dari permasalahan ini di Kota Surabaya. Meskipun di kota-kota besar, termasuk tempat umum, masih terlihat banyak anak yang berkeliaran secara bebas. Mayoritas anak jalanan berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang buruk, dan situasi ini sering kali memicu konflik dalam keluarga yang pada akhirnya mendorong mereka untuk memilih hidup di jalanan.

Jumlah anak jalanan di Kota Surabaya meningkat secara signifikan, dan tingkat kejahatan di kalangan mereka juga semakin tinggi. Banyak dari mereka yang ditangkap bukan hanya karena terlibat dalam kejahatan remaja seperti pencurian, perkelahian, merokok, dan minum-minuman keras, tetapi juga karena terlibat dalam kelompok kriminal anak jalanan yang sering kali mempergunakan mereka untuk kerja paksa tanpa bayaran. Anak jalanan rentan terhadap situasi ini karena kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar mereka.

Berikut tabel Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terbaru dari Dinas Sosial Kota Surabaya :

Tabel 1.2 Data Jumlah Penduduk Kota Surabaya

Kelompok	Jumlah Penduduk Surabaya Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
0-4	106385	105374	104840	102228	101219	100697	208613	206593	205537
5-9	115126	113950	112646	110090	109141	107932	225216	223091	220578
10-14	116369	115621	114971	109552	109040	108751	225921	224661	223722
15-19	113683	112538	111554	107786	106520	105395	221469	219058	216949
20-24	110592	109363	108114	107386	106099	104767	217978	215462	212881
25-29	113380	112752	112144	113676	112659	111731	227056	225411	223875
30-34	113715	113327	112890	113907	113201	112399	227622	226528	225289
35-39	117321	117028	116922	117155	116548	116175	234476	233576	233097
40-44	114109	114114	113851	117182	116853	116202	231291	230967	230053
45-49	103054	103966	104984	106327	107174	108127	209381	211140	213111
50-54	89059	90083	90939	93046	94112	94977	182105	184195	185916
55-59	71384	72910	74458	77899	79792	81644	149283	152702	156102
60-64	56688	58233	59759	63572	65643	67727	120260	123876	127486
65-69	41588	43337	44970	49378	51538	53587	90966	94875	98557
70-74	22767	24286	25884	28022	29673	31485	50789	53959	57369
75+	19948	20990	22115	31940	33200	34586	51888	54190	56701
Jumlah	1425168	1427872	1431041	1449146	1452412	1456182	2874314	2880284	2887223

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2024

Dinas Sosial Kota Surabaya telah meluncurkan program pemberdayaan bernama Kampung Anak Negeri (KANRI) untuk mengatasi masalah anak jalanan dan mengurangi ketimpangan sosial. Program ini diinisiasi pada tahun 2009 dengan tujuan mengembangkan anak-anak melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan. KANRI memberikan kesempatan bagi anak-anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan khusus dan perumahan, sehingga mereka dapat hidup lebih baik, lebih manusiawi, dan belajar berperilaku seperti anak-anak lainnya. Langkah ini adalah bagian dari upaya Dinas Sosial Kota Surabaya dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang mendukung perkembangan anak-anak dalam aspek sosial. Pemerintah Kota Surabaya telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk mengimplementasikan program ini dan berupaya menangani masalah anak jalanan melalui Dinas Sosial Kota Surabaya.

KAJIAN TEORITIS

Administrasi Publik

Kata administrasi merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris public Administration dan sering disebut dengan administrasi negara atau administrasi pemerintahan, Indradi (2006: 110). Menurut Chandler (1998), Indradi (2006: 114) menjelaskan administrasi publik adalah proses pengorganisasian dan pengkoordinasian sumber daya dan personel publik

untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola pengambilan keputusan kebijakan publik. Di sisi lain, Barton dan Chappell dalam Indradi (2006: 116) menyatakan bahwa administrasi publik adalah “the work of government”.

Starling dalam Indradi (2006: 116) menggambarkan administrasi publik sebagai segala sesuatu yang dilaksanakan oleh suatu pemerintahan, yaitu pelaksanaan keputusan kebijakan yang dijanjikan dalam kampanye pemilu. Menurut Rosenbloom, Indradi (2006: 116), gambaran administrasi publik adalah “penggunaan sarana administratif, hukum, dan politik”. Meliputi fungsi administratif, politik, dan hukum untuk pemenuhan seluruh atau sebagian misi negara di bidang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dalam rangka fungsi pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan beberapa penjelasan pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu proses kolaboratif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan, dengan mempertimbangkan kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat.

Kebijakan Publik

Kata “kebijakan publik” sering disebut “public policy” dalam bahasa Inggris. Definisi kebijakan publik sangat beragam. Banyak ahli yang mendefinisikan kebijakan publik dalam berbagai literatur. Walaupun para ahli mempunyai definisi yang berbeda-beda mengenai kebijakan publik, namun pada dasarnya mereka sama: apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Para penulis berkolaborasi dengan berbagai pendapat ahli untuk memfasilitasi pemahaman dan interpretasi kebijakan publik. Kebijakan Publik Thomas R. Dye yang dikutip dalam Saputra, (2022:2) menyatakan, “Kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.” Lebih lanjut Subarsono (2009: 2) mendefinisikan politik menurut Thomas R. Dye sebagai: (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dan bukan oleh swasta.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh George C. Edwards III dan Szarkansky yang dikutip oleh Yunida, (2017:12), yang menyatakan: Kebijakan publik adalah apa yang dikatakan, dilakukan, atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan adalah seperangkat tujuan dan sasaran program pemerintah. Hal ini dimulai dari pengertian politik yang diartikan sebagai (1) apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah terhadap suatu isu, (2) apa penyebab terjadinya isu tersebut dan apa dampaknya, dan (3) apa dampaknya adalah upaya untuk memahami dan menafsirkan apa yang diberikan. Pengaruh dan efektivitas kebijakan publik.

Evaluasi Kebijakan

Secara umum, evaluasi adalah proses mempertimbangkan secara kritis sesuatu, suatu kegiatan, suatu kebijakan, atau yang serupa. Hal ini termasuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan dan hasil program. Tujuannya adalah untuk membuat penilaian terhadap program, meningkatkan efektivitasnya, dan meninjau keputusan. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai sejauh mana pertanggungjawaban pengambil kebijakan publik kepada konstituennya. Kenali sejauh mana tujuan telah dicapai dan sejauh mana kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dengan kata lain, evaluasi memungkinkan Anda untuk mengetahui apakah proses implementasi kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Evaluasi mempunyai beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama dan terpenting, evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat diandalkan tentang sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang diwujudkan melalui kriteria kebijakan, khususnya Tindakan. Kedua, evaluasi berfungsi untuk memperjelas dan mengkritisi nilai-nilai yang mendasari pilihan kebijakan. Sasaran yang terdapat di evaluasi juga dapat mengkritik dan disesuaikan dengan masalah yang sedang ditangani lalu dipertanyakan secara sistematis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian secara metode evaluasi. Metode evaluasi juga dapat diartikan sebagai metode yang memiliki pendekatan dan Teknik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kinerja, efektivitas, dan dampak dari kebijakan public yang telah diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang apakah kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan, sejauh mana kebijakan tersebut berhasil, dan bagaimana dampaknya terhadap Masyarakat dan lingkungan, dengan tujuan agar dapat membuat secara factual, sistematis dan akurat.

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2014:6), Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian baik dari segi perilaku maupun persepsi, dan diuraikan dalam bentuk penjelasan tertulis. Penelitian ini mencoba menjelaskan evaluasi dan factor penghambat program tumbuh kembang Anak Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Surabaya seperti yang dipaparkan oleh peneliti ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UPTD KANRI dihuni sekitar 35 anak, selama berada di UPTD Kampung Anak Negeri, seluruh anak yang dibina mendapatkan berbagai jenis pembinaan, baik dalam bentuk Pendidikan formal maupun berbagai pelatihan dan pendampingan, sesuai prosedur yang diberikan UPTD, oleh karena itu melalui Kampung Anak Negeri, Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan bagi anak-anak, khususnya anak jalanan yang memiliki keterbatasan dalam melanjutkan Pendidikan. Sampai saat ini UPTD KANRI telah membantu serta memberikan kehidupan yang mandiri dan pekerjaan kepada anak jalanan dengan cara memberikan mereka pendidikan dengan cara memberikan mereka Pendidikan serta pelatihan yang mereka peroleh selama berada di KANRI. Dalam pelaksanaannya mereka didampingi oleh beberapa pelatih yang masing-masing memiliki keterkaitannya dan sesuai dengan bidangnya. Para Pembina di UPTD meliputi pendamping bakat dan minat jasmani, mental, dan spiritual, serta beberapa pelatih lainnya. Untuk menjalankan aktivitas sehari-hari para pendamping ikut mengawasi. Dalam jumlah Pembina tersebut sangat minim dan kurang efektif dalam memantau pengasuhan anak, banyak sekali anak-anak yang melanggar aturan yang diberikan oleh Pembina pada saat mereka diasuh.

Dibagian pembahasan, peneliti akan menjabarkan analisis dari hasil penelitian Bagaimana menangani Anak Jalanan di Kota Surabaya. Hasil penelitian ini diperoleh peneliti setelah melakukan penelitian di lapangan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori menurut William Dunn. Teori dari William Dunn ini terdapat 6 indikator yaitu 1) Efektivitas 2) Efisiensi 3) Kecukupan 4) Ketepatan 5) Perataan 6) Responsivitas. 6 Indikator tersebut harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan evaluasi suatu kebijakan. Teori William Dunn ini digunakan peneliti untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dari evaluasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Surabaya. Berikut adalah pembahasan mengenai kelima indikator tersebut :

1. Efektivitas

Dalam konteks kebijakan publik, efektivitas diukur melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Dari hasil penelitian yang telah ditinjau, efektivitas Program Kerja atau Tindakan yang dilakukan oleh UPTD Kampung Anak Negeri dalam memberikan pembinaan dan bimbingan sosial kepada anak jalanan dinilai berdasarkan kemampuan anak-anak tersebut untuk memperoleh keterampilan yang memadai

setelah mereka meninggalkan UPTD Kampung Anak Negeri, sehingga mereka dapat sukses dalam mencari pekerjaan.

Pelayanan sosial bagi anak jalanan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam mengembangkan potensi serta memberikan fasilitas yang mendukung motivasi dan usaha mereka dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Melalui program ini, pemerintah berupaya mengatasi masalah Pengemis, Pengembara, dan Anak Jalanan (PMKS), terutama dalam kategori anak jalanan yang menghadapi tantangan sosial yang kompleks. Kepala UPTD KANRI Wonorejo beserta seluruh pembina dan pelatih berkomitmen penuh untuk melaksanakan tugas UPTD KANRI sesuai dengan Perwali Surabaya No 199 Tahun 2021 mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi UPTD Dinas Sosial Kota Surabaya. Pemberian pelatihan dan pembinaan kepada anak-anak yang menghadapi masalah sosial serta memiliki kebutuhan khusus lainnya. Pembina dan pelatih tersebut memiliki pemahaman yang baik mengenai kebutuhan anak-anak, dan mereka berusaha sebaik mungkin agar anak-anak tersebut dapat menjadi individu yang memiliki perilaku normal dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kecukupan

Hasil penelitian yang saya tinjau menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan juga dilakukan dengan mengharuskan setiap warga negara menjalani pendidikan selama 12 tahun, serta dengan merancang kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter berdasarkan prinsip-prinsip kewarganegaraan yang telah diatur dalam undang-undang. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kampung Anak Negeri merupakan salah satu dari beragam langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menangani berbagai permasalahan sosial yang melibatkan masyarakat di Surabaya, terutama dalam penanganan anak-anak jalanan dan anak-anak yang menghadapi tantangan sosial. UPTD Kampung Anak Negeri menyelenggarakan pendidikan terpadu bagi anak-anak jalanan dengan tujuan memfasilitasi perkembangan optimal mereka selama masa belajar, didukung oleh pembina yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang arti pentingnya pembinaan bagi anak-anak jalanan.

Dalam kebijakan penanganan anak jalanan, UPTD Kampung Anak Negeri membutuhkan sumber daya manusia. Jumlah total pegawai di Kampung Anak Negeri sekitar 16 orang, dengan hanya 3 orang yang ditugaskan sebagai pembina untuk anak-anak jalanan. Namun, kekurangan sumber daya manusia khususnya untuk pembinaan anak-anak, mengingat jumlah anak jalanan yang perlu dibina jauh lebih banyak. Menurut wawancara dengan salah satu pembina yang dilakukan oleh peneliti, penambahan 2 atau 3 orang pembina akan sangat membantu, dan para pembina akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan

pembinaan yang baik kepada anak-anak jalanan, sehingga mereka merasa nyaman dan tidak cenderung melarikan diri saat dibina.

3. Efisiensi

Efisiensi mengacu pada jumlah usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Ini sering dianggap sebagai sinonim dari rasionalitas ekonomi, yang merupakan hubungan antara efektivitas dan upaya, yang sering diukur dalam biaya moneter. Dari hasil penelitian yang saya tinjau, UPTD Kampung Anak Negeri menyediakan lingkungan hidup yang memadai bagi anak-anak untuk tinggal dan belajar di sana. Dalam pelaksanaan kegiatan di UPTD Kampung Anak Negeri, setiap anak diberikan tabungan pribadi senilai Rp. 200.000,00 untuk memenuhi kebutuhan tambahan yang mungkin belum terpenuhi. Tabungan tersebut akan diberikan kepada anak-anak jika mereka telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh UPTD.

4. Perataan

Dalam konteks kebijakan publik, perataan mengacu pada pemberian keadilan dan pencapaian kesetaraan di dalam sasaran kebijakan. Dunn menjelaskan bahwa kesetaraan berkaitan dengan rasionalitas hukum dan sosial, yang merujuk pada distribusi konsekuensi dan usaha di antara beragam kelompok dalam masyarakat. Bertujuan untuk menghasilkan distribusi konsekuensi atau usaha yang adil di antara kelompok tersebut. Sebuah program dapat dianggap efektif, efisien, dan memadai jika manfaat dan biayanya didistribusikan secara merata. Intinya, perataan menyangkut keadilan atau kewajaran. Dari hasil penelitian yang saya telaah, Kampung Anak Negeri di Surabaya hanya menerima anak-anak jalanan yang berasal dari wilayah Surabaya. Bagaimana proses pengecekan dilakukan ketika orang tua atau wali ingin menempatkan anak-anak di UPTD? Staf UPTD akan melakukan verifikasi melalui kartu keluarga untuk memastikan bahwa anak tersebut benar-benar berasal dari wilayah Surabaya.

UPTD Kampung Anak Negeri telah berjalan dengan baik sesuai dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penanganan anak jalanan di Kota Surabaya. Sesuai dengan tugas dan tujuannya yang tercantum dalam Perwali Surabaya No. 199 Tahun 2021, UPTD ini bertugas memberikan pelatihan dan pembinaan kepada anak-anak yang menghadapi masalah kesejahteraan sosial di Kota Surabaya. Dalam hal pengawasan, Kampung Anak Negeri dipantau langsung oleh Kepala Kampung Anak Negeri, Dinas Sosial, dan Pemerintah Kota Surabaya, sesuai dengan pernyataan dari Ibu Eva Rachmawati, yang menjabat sebagai Kepala UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo.

5. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada sejauh mana tujuan program sesuai dengan nilai atau harga diri yang diinginkan, serta seberapa kokoh asumsi yang mendasari tujuan tersebut. Ketepatan juga dapat tercermin melalui indikator keberhasilan kebijakan lainnya, seperti dampak yang tidak terduga baik secara positif maupun negatif, atau kemungkinan adanya alternatif pelaksanaan kebijakan yang dianggap lebih baik sehingga kebijakan dapat beradaptasi secara lebih dinamis.

Dari hasil penelitian yang saya teliti, terdapat potensi hambatan yang mungkin timbul dalam aktivitas UPTD Kampung Anak Negeri. Salah satu contohnya adalah dalam pelayanan sosial, yang merupakan serangkaian program yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka penting untuk mencegah munculnya masalah sosial seperti kemiskinan, pengabaian, atau kriminalitas. Dengan dukungan dari Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial, didirikanlah UPTD Kampung Anak Negeri untuk melaksanakan kebijakan penanganan anak yang menghadapi masalah kesejahteraan sosial. Peran pemerintah dan dinas sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap proses evaluasi kebijakan ini. Dengan bantuan dan dukungan dari pemerintah dan dinas sosial, evaluasi kebijakan penanganan anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

6. Responsivitas

Responsivitas dari UPTD Kampung Anak Negeri mencakup kemampuannya dalam menangani masalah anak jalanan melalui pembinaan dan pendampingan. UPTD ini menyediakan fasilitas seperti pendidikan, pelatihan, dan tempat tinggal bagi anak jalanan untuk membantu mereka hidup lebih baik dan berintegrasi secara sosial. Pembinaan anak jalanan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka secara menyeluruh. Program pembinaan ini memiliki aturan dan program yang harus diikuti agar anak-anak dapat menjalankan kegiatan pendidikan dan aktivitas lainnya dengan normatif dan terarah. Mengatur dan membimbing anak-anak yang sulit untuk diarahkan akan menjadi tugas yang sangat sulit. Oleh karena itu, para pembina dan pelatih di UPTD Kampung Anak Negeri harus memiliki kemampuan untuk mengawasi anak-anak secara menyeluruh guna mencegah terjadinya masalah. Setiap anak diberikan pembina khusus yang mengawasi mereka dalam setiap kegiatan, sehingga anak-anak dapat beradaptasi dengan pembina mereka masing-masing dan mendapatkan arahan yang lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

UPTD harus mampu mengendalikan dalam proses pengawasan dan pembinaan anak-anak agar mereka dapat mengembangkan dirinya dan menemukan kemauan diri mereka, para pembina harus lebih sabar dalam membina anak-anak agar mereka dapat terus berproses dengan baik di UPTD, memberikan pelayanan yang terpadu bagi anak-anak membantu mereka dalam segala hal yang dirasa itu sangat sulit mereka lakukan sendirian, dan tentunya memperbaiki gedung UPTD yang mungkin sudah sedikit usang agar memperlancar proses pembinaan terhadap anak-anak. UPTD sudah sangat berkembang dengan baik melalui proses yang terpadu dan pelayanan yang terpadu.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, E. al. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan: Evaluasi Kebijakan Di Indonesi. In *Ideas Publishing* (Issue March).
- Arnol, M. (2013). *Evaluasi Kebijakan Program Jaminan Masyarakat Semesta di Kabupaten Lampung Utara*.
- Putri, A. A. Z. A. (2022). Permasalahan Anak Jalanan di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan di Surabaya). *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 1(1), 28–37. <https://doi.org/10.33830/antroposen.v>
- Riska Firdaus, B. (2022). EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DI DESA CIMPU. *Journal I La Galigo : Public Administration Journal*, 5(2).
- Saputra, R. D. (2022). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 56 TAHUN 2022 OLEH DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA PADA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL YANG TEPAT SASARAN*.
- Suleman, S., Pakaya, R., & Daud, Y. (2019). Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi Indonesia (JTII)*, 4(1), 30–39. <https://doi.org/10.30869/jtii.v4i1.374>
- Yunida, E. (2017). *Evaluasi Kebijakan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*. 1–23.